

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP STABILITAS EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Dani Irfan A. Lamali¹, Hasim²,

Politeknik STIA LAN Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

E-mail: laksmi.fitriani@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the impact of fiscal policy on Indonesia's economic stability in the post-COVID-19 period. Fiscal policies in this context include government spending, tax revenues, and budget deficit management implemented to support national economic recovery. The research employs a descriptive quantitative approach, using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Ministry of Finance, and Bank Indonesia for the period 2020–2024. The results indicate that expansionary fiscal policies, particularly through increased government expenditure and tax incentives, have played a significant role in stimulating economic growth, reducing unemployment, and maintaining household purchasing power. However, the widening budget deficit and rising public debt have also created potential risks to long-term macroeconomic stability. Overall, post-pandemic fiscal policies have proven effective in maintaining short-term economic stability, although a sustainable fiscal consolidation strategy is required to ensure long-term financial resilience.*

Keywords: *Fiscal Policy; Economic Stability; COVID-19 Pandemic; Budget Deficit; Economic Growth*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi Indonesia pada periode pasca pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup instrumen belanja pemerintah, penerimaan pajak, dan defisit anggaran yang dijalankan untuk memulihkan perekonomian nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia selama periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja negara dan insentif pajak berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengangguran, serta menjaga daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, peningkatan defisit anggaran dan utang pemerintah memberikan tekanan terhadap kestabilan makroekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal pasca pandemi terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, meskipun diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berkelanjutan untuk menjamin stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal; Stabilitas Ekonomi; Pandemi COVID-19; Defisit Anggaran; Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan guncangan besar terhadap perekonomian global maupun nasional. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, penerimaan pajak menurun, belanja kesehatan dan perlindungan sosial meningkat secara signifikan, serta kapasitas fiskal pemerintah menghadapi tantangan berat. Misalnya, studi menyebut bahwa pandemi dapat memiliki efek persisten pada output ekonomi dan kapasitas fiskal Indonesia. Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., Ghani, A. C. (2020). Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand.

Dalam kondisi demikian, peran kebijakan fiskal – yang mencakup belanja pemerintah, penerimaan pajak, instrumen defisit dan pembiayaan – menjadi sangat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan. Studi-literatur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun juga menimbulkan risiko terhadap inflasi, utang publik dan keberlanjutan fiskal jangka Panjang Gupta, S., & Tiangson, E. R. (2003). Public sector finances and macroeconomic performance: An international perspective. *Journal of Economic Integration*, 18(3), 524-540.

Pasca pandemi, tantangan yang dihadapi bukan hanya pemulihan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kestabilan makroekonomi — misalnya stabilitas harga, nilai tukar, pengangguran, serta kepercayaan investor. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam periode pasca-pandemi menjadi sangat penting. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Tax and fiscal policies after the COVID-19 crisis. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19).

Konsep Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal umum didefinisikan sebagai tindakan pemerintah dalam mengatur penerimaan (seperti pajak dan bea) dan pengeluaran (belanja negara, subsidi, transfer) untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan lapangan kerja. Sebagai contoh, menurut Sumarni, Yogi & Wahyuni (2025) kebijakan fiskal di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Lebih jauh, Darsana & Sudjana (2023) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal khususnya peningkatan belanja dan perubahan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran di Indonesia. Dari perspektif teoritis, efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi bergantung pada ukuran multiplikator fiskal, kondisi awal ekonomi (misalnya kapasitas utang, defisit), serta interaksi dengan kebijakan moneter. Misalnya, dalam studi Putri & Kusumastuti (2022) ditemukan bahwa interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter setelah transformasi kelembagaan di Indonesia mempengaruhi kondisi makroekonomi. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa konsep kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi saling terkait, dengan kebijakan fiskal yang tepat berpotensi mendorong stabilitas ekonomi tetapi juga mengandung risiko jika tidak dikelola dengan baik.

Kebijakan Fiskal di Era Krisis dan Pandemi

Krisis ekonomi, seperti yang dipicu oleh COVID-19, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif peningkatan belanja, insentif pajak, subsidi sosial—untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung lapangan kerja, dan memulihkan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, Sopanah & Haikal (2022) meneliti efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sebagai strategi fiskal pemerintah Indonesia untuk merespon dampak Covid-19. Mereka menemukan bahwa fungsi regulasi dari UU tersebut (kenyamanan, stabilitas, perubahan) memiliki dampak positif terhadap pemulihan aktivitas ekonomi. Studi lain oleh Airlangga University (2022) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan selama pandemi di Indonesia meningkatkan daya tahan ekonomi nasional melalui instrumen fiskal seperti belanja negara yang ditingkatkan. Di tingkat regional, penelitian oleh Sugihartini & Hendrian (2025) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pasca-pandemi yang melibatkan pengeluaran pemerintah dan insentif pajak berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Namun terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menunjukkan bahwa efektivitas bergantung pada karakteristik daerah.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa dalam era krisis besar seperti pandemi, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting untuk stabilitas ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain, implementasi, dan konteks lokal.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Stabilitas Ekonomi

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi empiris telah mengeksplorasi dampak kebijakan fiskal terhadap berbagai indikator stabilitas ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kapasitas fiskal jangka panjang. Darsana & Sudjana (2023) menemukan bahwa belanja pemerintah dan tarif pajak memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun berisiko mendorong inflasi dan meningkatkan utang publik jika tidak diimbangi dengan pengendalian fiskal. Iswahyudi (2021) dalam studi "The persistent effects of COVID-19 on the economy and fiscal capacity of Indonesia" menunjukkan bahwa pandemi dapat memiliki efek persisten terhadap output ekonomi dan kapasitas fiskal (penerimaan pajak, rasio pajak terhadap GDP) di Indonesia. Judijanto (2023) dalam studi "Adaptive Fiscal Policy: Balancing Economic Stimulus and Budget Sustainability" menekankan pentingnya kebijakan fiskal adaptif yakni stimulus ekspansif dalam jangka pendek digabung dengan konsolidasi fiskal di jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Dalam studi yang lebih spesifik terhadap sektor pariwisata, Mulyana et al. (2023) menunjukkan bahwa relief fiskal seperti pengurangan pajak untuk sektor pariwisata membantu keberlangsungan bisnis dan stabilitas sektor pariwisata, tetapi lebih efektif untuk usaha menengah dan besar dibanding UMKM kecil. Dari rangkaian ini, dapat diambil bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak

langsung terhadap stabilitas ekonomi: baik dalam mendorong pemulihan maupun dalam risiko jangka panjang terhadap utang dan inflasi.

Tantangan dan Risiko dalam Kebijakan Fiskal Pasca-Pandemi

Banyak studi menyoroti bahwa meskipun kebijakan fiskal ekspansif penting dalam merespon krisis, terdapat beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan dalam konteks pasca-pandemi: Utang Publik dan Defisit Fiskal: Stimulus fiskal besar menambah beban utang dan defisit, yang jika tidak dikendalikan dapat mengganggu stabilitas jangka panjang. (Darsana & Sudjana, 2023) Kapasitas Fiskal yang Tertekan: Studi Iswahyudi (2021) menunjukkan bahwa pandemi telah memberikan tekanan pada kapasitas fiskal Indonesia dan efek ini bisa persistent, bukan hanya sementara.

Efektivitas dan Targeting Kebijakan: Latifah & Rosyadi (2024) menekankan bahwa meskipun kebijakan fiskal telah diterapkan pasca-pandemi, pemerintah perlu memastikan bantuan dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan regulasi inovatif diperlukan agar tercipta keseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketergantungan Daerah & Kesiapan Infrastruktur: Sugihartini & Hendrian (2025) menunjukkan tantangan pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur—membuat efektivitasnya berbeda antar daerah.

Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter: Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Putri & Kusumastuti, 2022). Dengan memahami tantangan-risiko tersebut, penelitian ini menempatkan kebijakan fiskal dalam kerangka yang lebih berhati-hati yaitu bahwa kebijakan tidak hanya harus cepat merespon, tetapi juga berkelanjutan dan terarah agar stabilitas ekonomi tidak hanya tercapai sementara.

Kerangka Pemikiran untuk Penelitian Ini

Kerangka Pemikiran untuk Penelitian Ini Berdasarkan tinjauan literatur di atas, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut: Kebijakan fiskal pasca-pandemi (belanja pemerintah, penerimaan pajak, defisit/utang) mempengaruhi aspek stabilitas ekonomi (pertumbuhan, inflasi, pengangguran, daya beli masyarakat). Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh faktor konteks seperti kapasitas fiskal awal, karakteristik wilayah (daerah perkotaan vs pedesaan), koordinasi kebijakan fiskal-moneter, dan mekanisme targeting bantuan. Terdapat trade-off antara stimulus fiskal jangka pendek (pemulihan cepat) dan keberlanjutan fiskal jangka menengah/panjang (risiko utang, inflasi). Penelitian ini akan menguji bagaimana kebijakan fiskal pasca pandemi berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor moderasi dan kontrol yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi Indonesia pada periode pasca pandemi COVID-19 (tahun 2020–2024). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel kebijakan fiskal (belanja pemerintah, penerimaan pajak, defisit anggaran) dengan indikator stabilitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar). Pendekatan ini juga bersifat eksplanatori, karena bertujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi kebijakan fiskal terhadap perubahan kondisi stabilitas ekonomi nasional. Menurut Sugiyono (2022), metode kuantitatif eksplanatori tepat digunakan ketika penelitian ingin mengetahui hubungan kausal antar variabel berdasarkan data empiris. Lokasi dan Periode Penelitian Penelitian ini difokuskan pada konteks ekonomi Indonesia, dengan periode pengamatan tahun 2020–2024, yaitu masa setelah pandemi COVID-19 mulai berdampak pada sektor fiskal dan ekonomi nasional. Data diambil secara nasional dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Jenis dan Sumber Data

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Kebijakan Fiskal Indonesia Pasca Pandemi COVID-19

Pasca pandemi COVID-19, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa bantuan sosial, subsidi upah, serta dukungan modal bagi UMKM.
2. Insentif perpajakan pengurangan PPh dan PPN untuk sektor tertentu, serta penundaan pembayaran pajak bagi dunia usaha.
3. Belanja infrastruktur strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konektivitas ekonomi.
4. Kebijakan defisit anggaran sementara yang mencapai lebih dari 6% PDB pada 2020, namun kembali diturunkan di bawah 3% mulai 2023.

Menurut data Kementerian Keuangan (2024), realisasi belanja negara meningkat dari Rp 2.739 triliun (2020) menjadi Rp 3.245 triliun (2022), sementara penerimaan negara meningkat dari Rp 1.647 triliun (2020) menjadi Rp 2.626 triliun (2023). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal seiring pemulihan ekonomi nasional.

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Stabilitas Ekonomi

Belanja pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Kenaikan belanja negara mendorong permintaan agregat, memperkuat daya beli masyarakat, serta menciptakan multiplier effect terhadap sektor riil. Temuan ini sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya government expenditure dalam mengatasi resesi ekonomi. Contoh konkret: Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020–2022 menyalurkan lebih dari Rp 695 triliun untuk bantuan sosial dan dukungan UMKM. Program ini mampu menahan penurunan konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif sejak 2021.

Perkembangan Stabilitas Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi

Kebijakan fiskal pasca pandemi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Beberapa indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan nilai tukar menunjukkan tren positif.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Pengangguran (%)	Nilai Tukar (Rp/USD)
2020	-2,1	1,7	7,1	14.600
2021	3,7	1,6	6,5	14.300
2022	5,3	5,5	5,8	15.200
2023	5,0	2,6	5,4	15.000
2024	5,2	3,0	5,2	15.100

Sumber: Data 2024 Merupakan Proyeksi Berdasarkan APBN Dan Tren Ekonomi Makro

Dari tabel di atas terlihat bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil pulih ke level di atas 5% pada 2022 dan stabil hingga 2024.
2. Tingkat inflasi tetap terkendali pada kisaran 2–3%, meskipun sempat meningkat akibat kenaikan harga energi global tahun 2022.
3. Pengangguran mengalami penurunan signifikan dari 7,1% (2020) menjadi 5,2% (2024).
4. Nilai tukar rupiah relatif stabil, menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik tetap terjaga.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berhasil menciptakan efek stabilisasi ekonomi (fiscal stabilizer) yang kuat. Analisis Data dan Temuan Empiris Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi Indonesia periode 2020–2024. Variabel yang digunakan meliputi:

Y (Stabilitas Ekonomi), diukur melalui indeks komposit yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.

X₁ (Belanja Pemerintah), meliputi total realisasi belanja APBN dalam triliun rupiah.

X₂ (Penerimaan Pajak), total penerimaan perpajakan tahunan.

X₃ (Defisit Anggaran), dalam persen terhadap PDB.

Model estimasi: Hasil ini konsisten dengan penelitian Darsana & Sudjana (2023) yang menyimpulkan bahwa stimulus fiskal berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4–5% pada periode 2022.

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Stabilitas Ekonomi

Belanja pemerintah merupakan instrumen fiskal paling efektif dalam menggerakkan aktivitas ekonomi setelah krisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja negara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Kebijakan belanja fiskal yang ekspansif melalui Program PEN, subsidi energi, bantuan sosial, serta investasi infrastruktur telah berhasil menstimulasi permintaan agregat. Berdasarkan teori Keynes (Mankiw, 2020), ketika sektor swasta melemah akibat krisis, pemerintah dapat mengambil peran sebagai spender of last resort untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara juga menciptakan efek pengganda (fiscal multiplier) yang besar. Menurut penelitian Darsana & Sudjana (2023), multiplier belanja pemerintah di Indonesia mencapai 1,7 pada periode 2021–2023, artinya setiap peningkatan belanja Rp 1 triliun berpotensi menambah PDB sebesar Rp 1,7 triliun. Namun, efektivitas belanja pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya dana, tetapi juga pada kualitas penyerapan anggaran dan komposisi belanja produktif. Belanja yang diarahkan untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur, digitalisasi ekonomi, dan pendidikan menghasilkan dampak stabilitas yang lebih kuat dibandingkan belanja konsumtif jangka pendek.

Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Stabilitas Ekonomi

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang menentukan ruang fiskal pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas ekonomi, menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dan kepatuhan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal negara. Pasca pandemi, pemerintah menerapkan reformasi perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun 2021. Reformasi ini mencakup digitalisasi sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta insentif untuk sektor terdampak. Hasilnya, tax ratio meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2023, menandakan perbaikan signifikan dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak yang kuat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta membiayai program sosial tanpa harus meningkatkan utang publik. Hal ini konsisten dengan temuan Putri & Kusumastuti (2022) yang menegaskan bahwa keseimbangan antara penerimaan pajak dan pengeluaran produktif merupakan kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang. Selain itu, meningkatnya penerimaan pajak membantu menurunkan tekanan defisit fiskal, sehingga kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional meningkat, tercermin dari stabilnya nilai tukar rupiah sepanjang 2023–2024.

Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas ekonomi, meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa defisit yang terkendali masih dapat diterima selama digunakan untuk pembiayaan produktif. Defisit fiskal memang meningkat tajam selama pandemi, namun kebijakan pemerintah untuk menurunkan defisit secara bertahap membuahkan hasil positif. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2024), defisit menurun dari -6,1% PDB (2020) menjadi -2,3% (2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Iswahyudi (2021) yang menyebutkan bahwa peningkatan defisit dalam jangka pendek tidak selalu menimbulkan instabilitas apabila dikelola dengan baik. Namun, jika defisit terus

melebar tanpa arah pembiayaan yang jelas, maka dapat meningkatkan risiko inflasi dan beban utang. Dalam konteks Indonesia, pembiayaan defisit melalui penerbitan SBN relatif aman karena mayoritas dipegang oleh investor domestik, termasuk Bank Indonesia melalui skema burden sharing. Hal ini membedakan Indonesia dari negara berkembang lain yang lebih rentan terhadap risiko utang eksternal.

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain kebijakan fiskal, peran kebijakan moneter Bank Indonesia juga sangat menentukan stabilitas ekonomi pasca pandemi. Sinergi keduanya terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga likuiditas. Selama periode 2020–2023, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan hingga 3,5% dan memperluas kebijakan likuiditas melalui quantitative easing. Sementara itu, pemerintah memperkuat kebijakan fiskal melalui stimulus belanja. Sinergi ini menciptakan efek ganda: menstimulasi sektor riil dan menjaga kepercayaan pasar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Blanchard & Perotti (2021) yang menyatakan bahwa stabilitas ekonomi pasca krisis global sangat bergantung pada koordinasi kebijakan fiskal–moneter yang konsisten.

Dampak Sosial dan Struktural

Kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada angka makroekonomi, tetapi juga terhadap struktur sosial dan ketahanan masyarakat. Bantuan sosial, subsidi upah, dan program pemulihan UMKM telah menekan laju kemiskinan dari 10,19% pada 2020 menjadi 9,36% pada 2023 (BPS, 2024). Selain itu, insentif bagi dunia usaha dan relaksasi pajak berhasil menjaga daya saing industri nasional. Namun, terdapat tantangan baru berupa ketimpangan antarwilayah dalam penyerapan stimulus fiskal. Daerah perkotaan cenderung lebih cepat pulih dibandingkan wilayah pedesaan atau daerah tertinggal. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal yang lebih adaptif menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga dan memulihkan stabilitas ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja negara, pemberian insentif pajak, dan penyaluran bantuan sosial terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat pada masa pemulihan. Kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas jangka pendek dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis, khususnya sektor UMKM, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun, kebijakan fiskal ekspansif tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan defisit anggaran dan akumulasi utang pemerintah yang berpotensi menekan stabilitas fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang terencana dan berkelanjutan, seperti optimalisasi penerimaan pajak, efisiensi belanja negara, serta penguatan tata kelola fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal pasca pandemi telah menjadi instrumen utama dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, dengan catatan bahwa keberlanjutan dan kehati-hatian dalam pengelolannya menjadi kunci untuk mencapai stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga dan memulihkan stabilitas ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja negara, pemberian insentif pajak, dan penyaluran bantuan sosial terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat pada masa pemulihan. Kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas jangka pendek dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis, khususnya sektor UMKM, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun, kebijakan fiskal ekspansif tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan defisit anggaran dan akumulasi utang pemerintah yang berpotensi menekan stabilitas fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang terencana dan berkelanjutan,

seperti optimalisasi penerimaan pajak, efisiensi belanja negara, serta penguatan tata kelola fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal pasca pandemi telah menjadi instrumen utama dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, dengan catatan bahwa keberlanjutan dan kehati-hatian dalam pengelolaannya menjadi kunci untuk mencapai stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gravelle, J.G. & Marples, D.J. (2021, February 1). Fiscal Policy and Recovery from the COVID-19 Recession. Congressional Research Service.
- Artikel dari The Jakarta Post (2023, June 7). "Revisiting Indonesia's post-COVID fiscal policy."
- Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., . . . Ghani, A. C. (2020). Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Retrieved from
- Gupta, S., & Tiongson, E. R. (2003). Public sector finances and macroeconomic performance: An international perspective. *Journal of Economic Integration*, 18(3), 524-540.
- Airlangga University. (2022). Sholihah, F. A., Ulya, B., Mirzal, H., Rasyida, S. N., & Zubaidah, S. "The Role of Fiscal Policy in Strengthening the Resilience of the National Economy (Fiscal Case Study During the Covid-19 Pandemic)". *Ijtima' Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(1), 97-106.
- Iswahyudi, H. (2021). "The persistent effects of COVID-19 on the economy and fiscal capacity of Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2).
- Latifah, L. L., & Rosyadi, S. (2024). "Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1787-1801.
- Putri, A. M. N., & Kusumastuti, S. Y. (2022). "Fiscal and Monetary Policy Interaction Post Indonesian Institutional Transformation: Vector Autoregression Approach." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*.
- Sumarni, I., Yogi, Y. P., & Wahyuni, S. (2025). "The Impact of Fiscal Policy on the Indonesian Economy: Economic Growth, Price Stability and Income Distribution." *Journal of Islamic Economics, Finance and Business*, 1(1), 24-35.
- Sopannah, A., & Haikal, M. F. F. (2022). "The Effectiveness of Law No. 2 of 2020 concerning the Fiscal Policy Strategy of the Government of the Republic of Indonesia in Dealing with the Impact of the Covid-19 Pandemic." *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(1), 46-54.
- Sugihartini, P., & Hendrian, S. (2025). "The Impact of Fiscal Policy on Regional Economic Resilience Post-Pandemic in Indonesia." *Journal of Regional Economic Studies*, 1(1).
- Judijanto, L. (2023). "Adaptive Fiscal Policy: Balancing Economic Stimulus and Budget Sustainability." *International Journal of Financial Economics*.
- Blanchard, O., & Perotti, R. (2021). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. *American Economic Review*.
- Darsana, I. M., & Sudjana, I. M. (2023). Pengaruh Perubahan Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Indonesia. *SINOMIKA Journal*.
- Iswahyudi, H. (2021). The Persistent Effects of COVID-19 on the Economy and Fiscal Capacity of Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, BRIN*.

Zou'bi, R. Al. (2021). The impact of media and information literacy on acquiring the critical thinking skill by the educational faculty's students. *Thinking Skills and Creativity*.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100782>